

# Populisme Arya Wedakarna Sebagai DPD RI Dapil Bali

Putu Fhanny<sup>1)</sup>, Bandiyah<sup>2)</sup>, Gede Indra Pramana<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: putufhanny@gmail.com<sup>1</sup>, dyah\_3981@yahoo.co.id<sup>2</sup>, indraprama@unud.ac.id<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to find out how Arya Wedakarna's populism as DPD RI. This research framed using populism theory by Noam Gignon and Bart Bonikowski. The research uses qualitative descriptive method with primary and secondary data usage, because it describes and illustrates phenomena that exist, both natural and human engineering, which pay more attention to the characteristics, quality, interrelationship between activities in relation to Arya Wedakarna's populism as DPD RI district of Bali. The results of this study are: first, Arya Wedakarna's populism can be seen through his ideology, discursive style, and the political strategy when becoming a member of the DPD. His populist identity appear through right-populism that applied in some of his anti-plural policies and statements, including religious tendencies and ethnic issues. Second, Populism as political strategy then take the most dominant role in creating populist leader's identity as a member of DPD RI*

**Keywords:** Populism, Arya Wedakarna, DPD RI

## 1. PENDAHULUAN

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, SE (Mtru), M.Si atau sering dikenal dengan Arya Wedakarna atau AWK merupakan salah satu tokoh politik muda yang namanya kian melejit dalam perhelatan Pemilu 2019. Sosok politisi yang terpilih menjadi anggota DPD tersebut lahir di Denpasar, 23 Agustus 1980 dan pernah mengawali karir sebagai model cover boy di Majalah Aneka Jakarta pada 1997 (Tirto.id, 2019).

Peraih doktor dan rektor termuda oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) ini, menobatkan diri sebagai *Abhiseka*<sup>1</sup> Raja Majapahit Bali melalui pengumumannya dalam media massa pada 31 Desember 2009. Selain menjadi anggota DPD, Arya

Wedakarna juga aktif menjabat di berbagai organisasi bentukannya sendiri, salah satunya yaitu menjabat sebagai *President The Hindu Center of Indonesia* yang memiliki program ekonomi *Sukla Satyagraha*<sup>2</sup>, yakni gerakan bentuk protes terhadap pemerintah pusat akibat adanya kebijakan jaminan makanan halal bagi masyarakat muslim. Arya juga menolak ekonomi syariah dan moratorium bank syariah di Bali sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat Hindu. Dengan adanya penolakan ini, Arya Wedakarna semakin dikenal sebagai pemimpin yang cenderung anti-pluralisme. Gerakan-gerakan yang dicetuskan oleh Arya Wedakarna seringkali menimbulkan kontroversi karena menciptakan konflik horizontal antar masyarakat plural.

---

<sup>1</sup> Abhiseka adalah upacara penobatan seorang raja yang berasal dari India.

---

<sup>2</sup> Sukla Satyagraha adalah gerakan moral dalam menjaga taksu dan kesucian bali melalui ajengan/kuliner

Dalam konteks populisme, gerakan yang diciptakan oleh Arya Wedakarna ini merupakan bentuk strategi untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat Hindu. Sistem ekonomi terbuka cenderung lebih sulit untuk disandingkan dengan kultur ekonomi tertutup seperti Bali. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Arya Wedakarna untuk membenturkan isu agama dan ekonomi, mengingat adanya sentimentil antara warga asli Bali dengan pendatang yang dinilai menjadi saingan dalam kegiatan ekonomi.

Politik populis cenderung pada gaya menghasut dan sering menggalang dukungan massa untuk kepentingan politik pemimpin. Dalam Canovan (2000: 208), kaum populis menggalang dukungan melalui institusi demokrasi dan politisi dengan mendekati massa yang dianggap diwakilinya. Arya Wedakarna sering memosisikan dirinya hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai sebagai bentuk pembentukan citra pahlawan bagi masyarakat yang membutuhkan. Contohnya, penyelesaian masalah umat Hindu di Mangir Lor Bantul terkait pembubaran piodalan di rumah umat Hindu suku Jawa.

Arya Wedakarna memiliki pendukung militan yang tersebar menjadi beberapa kelompok, yaitu Relawan AWK 42 dan Gerakan Pemuda Marhaen. Kelompok pemenangan ini terdapat di kabupaten/kota provinsi Bali dan menyasar sampai ke tingkat desa dan banjar sebagai ruang terkecil masyarakat. Selain itu, penguasaan media sosial yang baik oleh Arya Wedakarna membuat jangkauan voter menjadi lebih luas sehingga informasi dan pembentukan citra melalui media sosial lebih mudah dilakukan.

Popularitas Arya Wedakarna terbukti semakin melejit dengan angka suara perolehan suara terbanyak pada pemilu tahun 2019, mencerminkan bahwa strategi populisme yang dilakukan mampu membangun basis suara untuk meraih kursi DPD RI. Beliau berhasil mengalahkan tokoh-tokoh yang telah lebih dahulu malang melintang dalam perpolitikan Bali. Hal ini menjadi menarik karena menunjukkan adanya strategi mobilisasi pemilih yang melebihi kekuatan calon-calon lainnya.

Dalam wawancara dengan Ketua Tim Pemenangan Arya Wedakarna, hal ini merupakan hasil dari akumulasi penggunaan strategi populis yang kemudian diterapkan menjadi sebuah kebiasaan oleh Arya Wedakarna sebagai topik utama dalam narasi kampanyenya. Terlebih masyarakat Hindu-Bali merupakan masyarakat yang mudah dimobilisasi melalui isu-isu kebudayaan dan etnisitas.

Populisme kemudian dijadikan strategi politik untuk meraih suara pemilih, dan strategi politik tersebut mampu merubah kedudukan gerakan-gerakan sosial, ekonomi, politik yang diproyeksikan untuk membuat kesejahteraan dan kebangkitan semangat masyarakat Bali, seperti yang sering dijadikan konsep panduan Arya, Trisakti Bung Karno yaitu (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya). Melalui hal-hal tersebut, penulis mencoba mengkaji keterkaitan strategi populisme dengan keterpilihan Arya Wedakarna sebagai DPD RI. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul Populisme Arya Wedakarna Sebagai DPD RI Dapil Bali

## 2. KAJIAN PUSTAKA.

### Populisme sebagai Ideologi

Naom Gidron dan Bart Bonikowski memahami ideologi sebagai sebuah kerangka mental. Kerangka mental ini membantu menginterpretasikan realita politik dan memberikan pedoman kepada tindakan politik. Suksesnya populisme sebagai ideologi menurut Penkowski adalah ketika aktor politik dapat membuat koneksi dengan budaya yang tersusun oleh *common sense* masyarakat umum.

Titik utama bahasan populisme sebagai ideologi diperhatikan melalui “pernyataan programatik” yang keluar dari aktor politik. Untuk melihat bekerja tidaknya populisme, penulis harus mengecek kebijakan-kebijakan aktor politik tersebut. “Pernyataan programatik” aktor politik itu akan direspon oleh rakyat. Respon ini adalah bentuk yang disebut *Taggart* sebagai indikator kesehatan dari demokrasi representatif. Populisme disini bekerja sebagai mekanisme kontrol elit agar dalam proses pembuatan kebijakan selalu berdasarkan kepentingan rakyat.

### Populisme sebagai Gaya Diskursif

Dalam menganalisis fenomena populis di Amerika Latin, de la Torre mendefinisikan populisme sebagai “retorika” yang membangun politik menjadi moral dan etika perjuangan antara rakyat maupun oligarki. Namun disini, kita dihadapkan dengan fenomena mengenai aktor politik yang dapat mengubah-ubah gaya retorikanya dengan mudah, terlepas dengan ideologi “resmi”-nya. Maka, definisi *populism as a discursive style* penting untuk digunakan sebagai

kacamata melihat fenomena aktor politik. Definisi tersebut membuat sudut pandang terhadap populisme bukan lagi identitas ideologi seorang aktor politik melainkan gaya *political talk* atau model ekspresi. Aktor populis pada umumnya menggunakan bahasa yang sederhana yang dapat dipahami masyarakat biasa.

Komunikasi aktor populis dengan konstituen biasa menggunakan komunikasi langsung. Aktor populis enggan menggunakan saluran komunikasi konvensional, seperti partai dan parlemen. Hal tersebut dianggap dapat mendistorsi kebijakan dengan rakyat sebagai pemilih (*voter*). Aktor populis terbiasa memilih saluran komunikasi langsung, seperti radio, TV, dan media sosial baru.

Menurut Michels Hasting populisme adalah gaya politik, yangmana termasuk sumber perubahan dengan menggunakan retorika untuk menarik rakyat. Bentuk diskursif memiliki karakteristik kebijakan programatik dan memiliki simbol yang kuat, misalnya isu mengenai pajak, etnis, elit, dan lain-lain (Michels Hastings, 2013).

### Populisme sebagai Strategi Politik

Populisme sebagai strategi politik memfokuskan diri pada metode dan instrument pemenangan dan penggunaan kekuasaan (*exercising power*). Titik tekan pada populisme sebagai sebuah strategi politik ada pada kebijakan-kebijakan, organisasi, dan kerangka mobilisasi. Karakteristik dari populisme sebagai strategi politik bisa dilihat pada calon atau penguasa yang sah (*actual ruler deploys*). Mereka yang

sah (*legitimate*) memiliki kapabilitas dalam berkuasa.

Menurut Weyland, kemunculan populisme adalah ketika ada upaya dari aktor politik menjalin kedekatan dengan masyarakat dan konstituennya menggunakan program yang berpihak pada aspirasi publik. Hal ini secara tidak langsung Weyland juga menganggap populisme sebagai sebuah strategi politik. Selain strategi politik penggunaan program-program yang sesuai dengan aspirasi publik, dapat juga dengan mobilisasi massa. Mobilisasi massa yang dilakukan bisa terorganisasi atau tidak (Weyland, 2001:12).

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif menggunakan data primer dan sekunder, karena mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, dan lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan dalam kaitannya dengan populisme Arya Wedakarna sebagai anggota DPD RI Dapil Bali.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Arya Wedakarna, Ketua Yayasan Mahendradatta, Adik Arya Wedakarna, Ketua Tim Pemenangan, dan Gerakan Pemuda Marhaen. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara kepada narasumber, serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal maupun penelitian sebelumnya. Kemudian, teknik analisa data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Populisme Ideologi Arya Wedakarna

Dalam konteks populisme Arya Wedakarna, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa gerakan-gerakan Arya Wedakarna diciptakan atas dasar penolakan terhadap beberapa kebijakan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menarik hati masyarakat yang terwakilkan. Untuk itu, Arya Wedakarna menciptakan beberapa gerakan pro masyarakat Hindu sebagai masyarakat yang menjadi *voter* terbesarnya.

Salah satunya yaitu gerakan bernama *Sukla Satyagraha*. *Sukla Satyagraha* adalah gerakan moral dalam menjaga *taksu* dan kesucian bali melalui ajengan/kuliner *sukla* yang merupakan bagian dari budaya mengenai cara mengolah/memilah makanan yang bersih, higienis dan tetap terjaga kesuciannya. Gerakan *Sukla Satyagraha* memiliki tujuan membangkitkan perekonomian masyarakat Bali dan membangkitkan militansi terhadap *ajengan Sukla* sebagai wujud strategi umat Hindu menyiasati terkait Jaminan Produk Halal dalam Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014, produk UU yang dinilai kurang menguntungkan bagi umat Hindu di Bali (Wedakarna.net, 5 Desember 2018).

Dalam konteks ini, Arya Wedakarna memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat Hindu-Bali menengah ke bawah sebagai tujuan dari gerakannya. Preferensi memilih masyarakat ekonomi menengah ke bawah sebagai masyarakat tradisional cenderung

dipengaruhi oleh faktor personal, seperti kemampuan pemimpin untuk merepresentasikan budaya daerahnya. Arya Wedakarna mampu melebur bersama umat Hindu-Bali dengan memanfaatkan sentimen budaya dan agama, dimana sesuai dengan dasar gerakan *sukla* yang bertujuan memerangi gempuran ekonomi halal yang dinilai tidak sesuai dengan konsep ajengan *sukla*.

Fenomena gerakan militan Hindu oleh Arya Wedakarna ini dapat dimaknai sebagai gerakan populis reaksioner (populisme kanan). Menurut Canovan (2000: 807), populisme reaksioner mendapat popularitas dengan mempermainkan permusuhan etnis. Hal ini diperkuat oleh penolakan Arya Wedakarna terhadap moratorium Bank Syariah di Bali, sekaligus menjadi penanda awal dari penolakan syariah-syariah lainnya di Bali. Arya Wedakarna menganggap bank syariah tidak cocok diterapkan di Bali

Hal ini sejalan dengan populisme reaksioner (populisme kanan) yang diterapkan oleh Arya Wedakarna. Lee (2007) berpendapat bahwa seorang populis setidaknya harus mempertahankan musuh abadi untuk menciptakan provokasi dalam rangka menarik hati masyarakat yang merasa terwakili. Dalam konteks Arya Wedakarna, gerakan-gerakan yang diciptakannya cenderung konsisten memprovokasi antara masyarakat Muslim dan Hindu di Bali.

### **Populisme Gaya Diskursif Arya Wedakarna**

Bentuk komunikasi dari aktor populis cenderung menggunakan bentuk komunikasi langsung dengan rakyat. Aktor populis

enggann menggunakan komunikasi konvensional, seperti partai dan parlemen karena dianggap dapat mendistorsi kebijakan dengan rakyat sebagai pemilih (*voter*). Aktor populis lebih memilih komunikasi langsung, seperti radio, TV, dan media sosial baru (Gidron dan Bonikowski, 2013). Dalam konteks ini, Arya Wedakarna yang berjuang melalui jalur Independen DPD RI selalu memanfaatkan bentuk komunikasi langsung dengan masyarakat. Melalui wawancara dengan adik Arya Wedakarna, I Gusti Ngurah Wira Wedawitry menyatakan bahwa setiap sebulan sekali Arya Wedakarna melakukan dialog interaktif di Bali TV sebagai media komunikasi masyarakat dengan dirinya langsung.

Arya Wedakarna memiliki tim komunikasi yang bertugas dalam pemanfaatan media tersebut sebagai alat komunikasi politik dalam bentuk kampanye untuk memberitakan dan memperkenalkan Arya Wedakarna ke publik. Dari berbagai media, Arya Wedakarna menggunakan media cetak seperti koran dan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan konstituennya. Media-media ini memiliki segmentasi masyarakat yang berbeda, sesuai dengan jenis masyarakat penggunaannya.

Media berita seperti koran merupakan sarana yang tepat guna untuk masyarakat yang tidak populer dengan media sosial seperti masyarakat usia lanjut. Dalam rangka menjangkau masyarakat kalangan jenis ini, Arya Wedakarna memanfaatkan kolom *Adv (Advertisement)* pada media Balipost dan Fajar Bali. *Adv* merupakan istilah yang merujuk pada pola penulisan media yang membuat sebuah iklan seolah-olah seperti

sebuah berita dan hal ini juga dikenal dengan nama *native advertising* yang biasa dipesan oleh seseorang (Tempo.com, edisi 24 Januari 2020).

Bali Post merupakan tempat penggunaan *Adv* yang biasa digunakan oleh Arya Wedakarna. *Adv* dalam Bali Post bernama berita *Advertorial*, dengan harga Rp. 2.250.000/iklan. *Advertorial* dalam Bali Post berarti berita pesanan/iklan yang bukan ditulis oleh wartawan, melainkan oleh tim redaksi pemesan. Berita *Adv* dapat dilihat melalui berita berawalan "ad" atau tanda "\*", contohnya (ad813), (ad119), dan sebagainya (Dikutip dari instagram @Info\_Tabanan, edisi 2 Maret 2020). Berdasarkan fakta tersebut, *Adv* dijadikan alat dan media untuk membuat propaganda, pencitraan, dan mempromosikan sosok Arya Wedakarna.

Media sosial juga tidak luput dari lirikan Arya Wedakarna, salah satunya facebook. Facebook Arya Wedakarna sempat menjadi sorotan karena membungkam kritik yang ditulis dalam kolom komentar facebook dengan memblokir akun si pengkritik. Pengkritik dengan nama Wachyu Donald mengkritik pada bulan Mei 2016, terkait permasalahan terbunuhnya seorang polisi dalam upaya penangkapan terhadap seorang warga Negara Prancis bernama Amokrabe Sabet yang diketahui sering membuat onar di Bali. Dalam kolom komentar Wachyu mengkritik akun Dr. Arya Wedakarna yang dianggap mencari sensasi terkait hangatnya pemberitaan tersebut, dengan menuliskan komentar yang menyatakan bahwa Arya Wedakarna hanya merespon berita yang telah viral sebelumnya. Beberapa saat kemudian, komentar tersebut terhapus bersamaan

dengan diblokirnya akun Wachyu sehingga tidak bisa menuliskan komentar. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa Arya Wedakarna tidak menerima komentar yang tidak sejalan dengan kehendaknya, untuk meminimalisir citra negatif terhadap dirinya. Hal ini dapat menandakan bahwa Arya Wedakarna tergolong dalam pemimpin anti-demokrasi (populisme kanan) karena bersifat anti kritik.

Dalam fenomena politik, penggunaan media sebagai alat kampanye seringkali dikatakan sebagai alat pencitraan. Dalam tatanan politik, citra merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki oleh politisi. Hal ini juga dipahami dengan baik oleh Arya Wedakarna sehingga memanfaatkan alat komunikasi politik seperti media secara maksimal. Selain itu, ia sering menggunakan jargon-jargon *Sukla* maupun *Ratu Aji* sebagai ciri khas berbeda dari calon-calon lainnya. Ciri khas inilah yang kemudian membentuk sebuah citra dan pelabelan oleh masyarakat untuk Arya Wedakarna sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Masyarakat Bali cenderung memilih pemimpin yang mampu merepresentasikan kultur daerahnya, sehingga Arya Wedakarna menjadikan isu-isu kultural sebagai retorika politiknya. Sebelum menjabat sebagai anggota DPD RI Bali, Arya Wedakarna berhasil menciptakan identitas yang kontroversial yaitu sebagai *Abhiseka* Raja Majapahit Bali melalui pengumumannya dalam media massa pada 31 Desember 2009. Menurut Arya Wedakarna, *Abhiseka* Raja Majapahit merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat terhadap Arya Wedakarna selain 4 atau 5 gelar raja lain yang diberikan

oleh masyarakat. Pada 31 Desember 2009, tepatnya di Pura Besakih, bersama dengan penglingsir warga masyarakat ramai-ramai meminta Arya Wedakarna menerima tongkat komando peninggalan Eyang Purwo, dan sekaligus menyerahkan amanat dan prasasti bahwa Shri I Gusti Arya Wedakarna merupakan Raja mereka.

Dalam wawancara dengan penulis, gelar Raja Majapahit yang dimilikinya berawal ketika Arya Wedakarna melihat adanya pengusiran umat Hindu yang ada di Trowulan, Jawa Timur. Disana terdapat Pura dan Pelinggih, dan umat Hindu sebagai minoritas. Pada waktu itu, terdapat *pemedek-pemedek* (orang-orang) dari Bali termasuk juga rohanian Hindu, yang sempat diusir oleh warga setempat karena sentimental agama. Kemudian, pada saat itu Arya datang dan memberikan perlindungan serta pernyataan bahwa saudara-saudara Hindu di Jawa tidak perlu khawatir. Kehadiran Arya beberapa kali ke tempat itu dinilai oleh masyarakat sekitar sebagai pemecah masalah melalui advokasi dan pemeliharaan pusaka-pusaka Hindu oleh Arya Wedakarna. Sebagai proses dari dukungan Arya Wedakarna terhadap umat Hindu di daerah tersebut, Arya mendorong pendirian dua pura dari umat Hindu Jawa ini di Puri Gading Jimbaran dan di GWK (Garuda Wisnu Kencana).

Pengumuman di media mengenai pengakuan Arya Wedakarna sebagai Raja Majapahit ini kemudian menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat karena kurangnya bukti atas pengakuan tersebut dan mendapatkan penolakan oleh tokoh-tokoh puri di Bali. Salah satu penolakan keras dilakukan oleh tokoh Puri Jembrana yaitu Anak Agung

Gde Benny Sutedja. Putra dari Gubernur Bali pertama tersebut meminta Arya Wedakarna berhenti mengklaim dirinya sebagai Raja Majapahit (Balebengong.id, 2017).

Penolakan *Abhiseka* Raja Majapahit Arya Wedakarna juga dilakukan oleh beberapa tokoh Puri lainnya melalui pertemuan seluruh wakil Puri besar di Bali, 57 Puri kecil dari seluruh Bali, perwakilan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada 9 Oktober 2011. Pertemuan ini kemudian menghasilkan surat pernyataan atas nama Paiketan Puri-puri se-Jebag (seluruh) Bali yang berisi penolakan terhadap oknum yang mengklaim sebagai Raja Majapahit, dalam hal ini Arya Wedakarna, karena berdasarkan bukti sejarah, di Bali tidak pernah ditemukan keturunan Raja Majapahit, walaupun Bali pernah dikuasai Majapahit pada 1352 hingga 1677. Surat pernyataan tersebut juga dikirimkan kepada Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN). Dalam surat tertanggal 17 Oktober 2011 tersebut, FSKN Bali mengatakan dengan lugas dan tegas menolak adanya oknum yang mengaku sebagai *Abhiseka* Raja Majapahit Bali (BaleBengong.id, 2017).

Dilihat dari sisi modernitas, sebuah pengakuan dalam bentuk *Abhiseka* tersebut tentunya terlihat aneh jika dikaitkan dengan sistem demokrasi yang dianut Negara Indonesia saat ini. Terlepas dari benar atau tidaknya pernyataan kontroversial *Abhiseka* Raja Majapahit tersebut, dalam kosmologi Nusantara, trah dan silsilah memiliki peran yang besar dalam kepemimpinan dan

spiritualisme seseorang. Sehingga tidak heran Arya Wedakarna dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi nilai spiritualisme Hindu-Bali dan membuat preferensi masyarakat untuk memilih tokoh politik yang merepresentasikan agama dan budaya

Identitas ini identik dengan pembelaan kedaulatan dan masyarakat Hindu Bali yang mendapatkan diskriminasi, baik di lokal maupun nasional. Kemudian, isu-isu dalam konteks simbol seperti diskriminasi agama, etnis, dan elit yang mengganggu serta mengancam umat Hindu Bali menjadi tema sentral yang sering disampaikan kepada masyarakat dalam kampanye nya dan tidak jarang menimbulkan pro kontra.

. Populisme bukan lagi identitas ideologi seorang aktor politik dalam definisi ini, melainkan merupakan gaya *political talk* atau retorika. Aktor populis biasanya menggunakan bahasa yang sederhana yang dapat dipahami oleh orang biasa (Gidron dan Bonikowski, 2013). Dalam hal ini Arya Wedakarna juga sering datang dan memberikan pernyataan baik melalui diskusi maupun pidato ketika diundang dalam acara-acara desa seperti hari ulang tahun pemuda-pemudi desa dan bahkan datang ke acara pernikahan (jika di undang). Sebagai ciri khas *political talk* nya Arya Wedakarna terkenal dengan kata-kata “*Ajik Pantau*”, “*Nyama Dauh Tukad*”, dan “*Bali Berdaulat*” sebagai bentuk ekspresi saat mengkampanyekan mengenai gerakan *Sukla*. Dengan ciri khas *political talk* ini, maka terbentuklah simbol dan identitas diri yang pada akhirnya memudahkan pemilih untuk mengingat Arya Wedakarna.

## **Populisme Strategi Politik Arya Wedakarna**

Dalam penelitian ini, populisme sebagai strategi politik yang dimaksud adalah kekuasaan yang diperlihatkan Arya Wedakarna, termasuk cara mempertahankan kekuasaan melalui mobilisasi massa baik langsung maupun tidak langsung. Menjadi anggota dewan melalui jalur Independen memperlihatkan Arya Wedakarna adalah seorang individu yang personalistik, dan tidak mewakili kelompok ataupun partai. Memanfaatkan media komunikasi untuk lebih dekat dan meyakinkan masyarakat juga mencerminkan dukungan bisa hadir melalui dukungan masyarakat yang tidak terinstrusionalisasi.

Dalam populisme, menjalin kedekatan kepada msyarakat dan konstituen menggunakan program yang berpihak dengan aspirasi publik adalah upaya dari aktor politik. Menurut adik kandung Arya Wedakarna, kedekatan ini dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan keagamaan seperti : *odalan*, *menyama braya*, *pujnama/tilem* dan sebagainya. Kegiatan keagamaan merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan massa sehingga seorang aktor dapat melebur bersama masyarakat sekaligus menjalin kedekatan politis dengan *voter*. Dalam konsep upacara keagamaan di Bali, kegiatan biasa dilakukan dengan gotong royong dan saling membantu antar masyarakat dalam pemenuhan sarana dan prasarana.

*Sukla Satyagraha* hadir sebagai solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui konsep saling bantu-membantu antar umat Hindu Bali guna menyasiasi situasi

perputaran ekonomi di Bali yang satu atau enam bulan sekali wajib melakukan upacara keagamaan yang telah disebutkan sebelumnya. Strategi ini sangat tepat guna pada masyarakat tradisional, dimana agama, budaya dan adat-istiadat ini sangat mudah dipergunakan untuk mobilisasi politik terutama di daerah yang masyarakatnya belum sepenuhnya terdidik, apalagi jika mobilisasi dilakukan dengan basis adat-istiadat. Hal-hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jaringan yang ada dalam struktur sosial masyarakat Bali. Sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, populisme Arya Wedakarna membentuk citra positif bagi dirinya sebagai salah satu komponen pendulang suara.

Menurut I Wayan Supiartha (Ketua Tim Kampanye Provinsi Bali), dalam memperkenalkan personalistik Arya Wedakarna, tidak terlalu banyak program kerja yang disampaikan, namun gerakan *Sukla Satyagraha* selalu digelorakan atas arahan Ratu Aji (Arya Wedakarna). Tim pemenangan lebih sering memperlihatkan prestasi, pengalaman-pengalaman, dan perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh Arya Wedakarna, baik sebelum menjadi DPD maupun sesudahnya. Mekanisme kampanye seperti ini didukung dengan pemilihan segmentasi masyarakat yang tepat, akan menciptakan basis suara yang kuat.

Dalam strategi yang lebih luas Arya Wedakarna memiliki cara mobilisasi lain, seperti Relawan AWK 42 dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM), sebagai pendukung militannya yang turut hadir sebagai penghubung Arya Wedakarna dengan *grassroot*. Menurut salah satu anggota GPM

Krisna Sentosa, GPM menysasar anak-anak muda melalui teman seperkumpulan dengan topik pembahasan Arya Wedakarna diberbagai tempat. Gaya komunikasi *person to person* seperti ini memang efektif digunakan. Selain kelompok pendukungnya, Arya Wedakarna juga sering datang dan diundang ke daerah-daerah untuk berdialog dengan masyarakat. Selain dalam masyarakat umum, Arya Wedakarna juga memiliki sasaran pendukung lain yang menguntungkan. Arya Wedakarna yang merupakan mantan rektor Universitas Mahendradatta dan saat ini dijabat oleh adiknya, memanfaatkan hal ini sebagai peluang politis untuk memperkenalkan Arya Wedakarna di universitas tersebut dalam rangka mendulang suara lebih besar.

Populisme Arya Wedakarna memiliki kemiripan dengan populisme Islam. Populisme Islam menurut Vedi R. Hadiz (2016), menjelaskan bahwa dalam *Islamic populism*, gerakan/aliansi yang terbentuk terdiri dari beragam kelas yang asimetris (koalisi multikelas) dan massa yang terhimpun di dalamnya beragam (heterogen). Perbedaan antarkelas dalam *Islamic populism* akan menjadi hilang disatukan oleh sebuah simbol bersama keagamaan tertentu yang telah disepakati.

Berdasarkan pandangan tersebut, Arya Wedakarna seperti melakukan populisme Hindu versi daerah Bali. Bali yang mayoritas berpenduduk Hindu, dimanfaatkan dengan baik oleh Arya Wedakarna dalam menggabungkan masyarakat yang asimetris dan menghilangkan perbedaan antar kelas yang disatukan oleh sebuah simbol keagamaan Hindu. Narasi-narasi perjuangan

dan pembelaan terhadap masyarakat Hindu Bali yang sering digunakan kemudian dimanfaatkan untuk mobilisasi massa baik langsung maupun tidak langsung dan menjadikannya strategi politik.

Namun meskipun demikian, populisme Arya Wedakarna yang cenderung bersifat populis lokal (daerah) tentunya memiliki kelompok yang tidak selalu pro terhadapnya. Kelompok bahkan tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan hal-hal yang dilakukan Arya berusaha menentang segala bentuk statement, program kerja maupun karakter-karakter pribadi.

Dalam wawancara dengan 5 masyarakat dengan klasifikasi ekonomi *upper class*, serentak berpendapat bahwa hal-hal seperti gerakan sukla dan Abhiseka Raja Majapahit merupakan sesuatu yang kurang relevan diterapkan di jaman modern. Kelompok ini menganggap kemampuan manajerial lebih penting dibandingkan dengan retorika politik seperti ini. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa beberapa lembaga menolak adanya Abhiseka Raja Majapahit terhadap Arya Wedakarna karena dinilai membangkitkan feodalisme. Sedangkan 3 dari 5 masyarakat klasifikasi *middle class* mengatakan bahwa mereka tidak mementingkan isu-isu kultural sebagai preferensi memilih seorang pemimpin dan menganggap gerakan-gerakan Arya Wedakarna tidak membawa dampak berarti bagi kinerjanya sebagai seorang anggota DPD.

Untuk masyarakat dengan kelompok sosial *lower class*, hanya 1 orang yang tidak setuju dengan gerakan Arya Wedakarna karena dinilai tidak membawa dampak signifikan untuk masyarakat. Sisanya, menganggap

menjadikan gerakan-gerakan Arya Wedakarna sebagai referensi untuk memilih beliau. Kelompok ini berpendapat bahwa isu-isu kultural seperti gerakan Sukla penting untuk diterapkan di Bali demi keberlangsungan ekonomi masyarakat Hindu Bali.

Berdasarkan analisis penulis, populisme Arya Wedakarna bergerak dengan membenturkan rakyat dengan elit yang berusaha mengambil kebijakan yang dianggap berpotensi menciptakan konflik kultural antar masyarakat Bali, misalkan seperti penolakan Wisata Halal di Bali dan penolakan Bank Syariah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Canovan (2000: 807), yaitu mengenai populisme reaksioner yang pelakunya mendapat popularitas dengan mempermainkan permusuhan etnis. Dalam masa kepemimpinannya, Arya Wedakarna memang dikenal sering membenturkan antara masyarakat Muslim dan Hindu Bali, sehingga timbul provokasi dari kedua masyarakat.

Selain penolakan Bank Syariah, gerakan makanan Sukla yang diciptakan oleh Arya Wedakarna juga menimbulkan kontroversi karena bertujuan untuk menyaingi kebijakan sertifikasi halal oleh pemerintah pusat. Sertifikasi halal dinilai tidak menguntungkan masyarakat Hindu Bali, seperti pengusaha daging babi. Sehingga relevan dengan hasil temuan di lapangan yang menyatakan bahwa kelompok pendukung gerakan ekonomi Sukla ini berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah (*middle to lower class*).

Berbeda dengan populisme sebagai ideologi, konsep populisme sebagai gaya diskursif menempatkan media komunikasi, *political talk*, dan retorika politik sebagai faktor

aktor populis dekat dengan masyarakat serta mampu menyampaikan program kerja dan statement-statement yang merepresentasikan dukungan terhadap masyarakat. Arya Wedakarna yang identik dengan *statement* menggelora, motivator, kontroversial, bahkan sampai provokator sangat memanfaatkan media sebagai tempat memperkenalkan diri, memperjuangkan aspirasi, dan juga alat kampanye. Kunci dari konsep populisme gaya diskursif menempatkan media komunikasi langsung (interaktif) dengan konstituen sebagai *voter*.

Pengakumulasian antara populisme sebagai ideologi dan populisme sebagai gaya diskursif ini kemudian menciptakan populisme sebagai strategi politik. Populisme sebagai strategi politik menjadi lebih terstruktur, karena diawal sudah terdapat populisme ideologi yang membentuk identitas, dan populisme gaya diskursif yang menjadi sarana bagi Arya Wedakarna untuk memperkenalkan diri. Langkah strategi politik tentunya memiliki ciri khas tersendiri. Sebagai mantan rektor dan telah pernah memiliki pengalaman dua kali gagal sebagai anggota dewan (2004 dan 2009) serta sudah pernah memenangkan kursi dewan (2014), tentunya dalam Pemilu 2019 persiapan Arya Wedakarna sudah matang. Konsistensi melakukan advokasi, memanfaatkan media sebagai tempat publikasi (menghasilkan konstituen nonorganisir), dan sudah memiliki identitas anggota dewan yang vokal mewakili Bali membuat jalan meraih suara tertinggi sudah terbuka lebar. Hal ini menjadikan populisme sebagai strategi lebih fokus kepada cara-cara kampanye untuk meraih *voter*.

Dari tiga konsep populis yang digunakan Arya Wedakarna, populisme sebagai strategi politik memiliki pengaruh paling dominan karena semua fenomena yang terjadi dilakukan atas dasar kepentingan untuk mendulang suara dan meraih kekuasaan. Arya membentuk identitas pribadi dimasyarakat dengan memainkan tendensi agama dan etnis baik dalam statement maupun program kerja, kemudian media komunikasi langsung dan tidak langsung digunakan untuk menjangkau *voter*. Hal ini menandakan Arya Wedakarna seseorang yang oportunis. Gerakan-gerakan populis yang seharusnya bergerak atas dasar kepentingan rakyat, berubah menjadi strategi politik untuk mendulang massa dan suara. Kemudian, disinilah terjadi pergeseran definisi populis.

Selain itu, Arya Wedakarna merupakan tokoh yang condong populis kanan (konservatif dan anti-demokratis). Anti-demokratis ditunjukkan saat ia melakukan penghapusan komentar dan memblokir akun yang tidak sejalan dengan narasinya. Namun, dalam teori populis, tipe kepemimpinan populisme akan tepat guna jika dilakukan dalam segmentasi masyarakat yang tepat. Arya Wedakarna memahami hal ini sebagai strategi untuk menciptakan basis dukungan dengan cara menyesuaikan jenis masyarakat yang akan menjadi pemilihnya. Sehingga Arya Wedakarna cenderung menyasar masyarakat tradisional yang lebih mudah dimobilisasi menggunakan isu-isu tradisional seperti agama, budaya, dan istiadat. Kemudian, dengan adanya dukungan 742.781 suara untuk Arya Wedakarna pada Pemilu 2019, memperlihatkan bahwa Arya Wedakarna

merupakan tokoh populis yang berhasil menggunakan tipe kepemimpinan tersebut untuk membentuk basis perjuangan di Bali.

## 5. KESIMPULAN

Pada bagian ini akan mengemukakan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian yang tercantum pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil temuan dan analisa, fenomena Arya Wedakarna dalam penelitian ini dikorelasikan sehingga menghasilkan sebuah identitas populis yang dijadikan strategi politik untuk menjadi anggota DPD RI Dapil Bali..

Daerah provinsi Bali sebagai ranah merupakan tempat yang tepat untuk Arya Wedakarna mendayagunakan kondisi sosial dan ekonomi sebagai peluang politis, ditambah dengan konsep populisme dalam proses kemenangan Arya Wedakarna. Sehingga menghasilkan dukungan strategis oleh pendukungnya dalam proses pencalonan maupun untuk mempertahankan kedudukan yang dimiliki oleh Arya Wedakarna.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiarjo, M. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harrison, L. (2007). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasquino, Gianfranco. (2008). *Populism and democracy*. Political Studies.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian : Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS
- Kiswardi, Bambang G dan Pariadnya, I Gede. (2017). *Gerakan Ekonomi Satyagraha*. Pustaka Bali Post.
- Skripsi dan Artikel Ilmiah :**
- Alan, Knight. (1988). *Populism and Neopopulism in Latin America. Especially Mexico*, Journal of Latin American Studies. Vol. 30. No. 2, England: Cambridge University Press. Hal. 226.
- Canovan, Margaret. 2000. "Populisme." In The Social Science Encyclopedia, ed. Adam Kuper dan Jessica Kuper. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kenneth, M. Roberts. (1996). *Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case*. World Politics 48, No. 1. Hal. 88.
- Kurt, Weyland. (2001). *Clarifying a Contested Concept: Populism in The Study of Latin Amerika Politics*. Comparative Politics, Vol. 34, No. 1, hlm. 12-13.
- Lee, Antony. 2017. "Kepahlawanan dalam Intipan Populisme." Kompas.
- MichelS Hastings. (2013). *The Rise of Populism and Extremist Parties in Europe*. The Spinnelli Group. Hlm. 10.
- Noam Gidron dan Bart Bonikowski. (2013). *Varieties Of Populism : Literatur Review and Research Agenda*. Working Papper Series; Weatherhead center for International Affairs Harvard University.
- Roberts, Kenneth. M, (2006), *Populism, Political Conflict, and GrassRoots*

*Organization in Latin America.*  
Comparative Politics, Vol. 38, No.2

Rooduijn, M., De Lange, S. L., & Van der Brug, W. 2014. *A Populist Zeitgeist? Programmatic Contagion by Populist Parties in Western Europa.* 1-20.  
DOI: 10. 1177/1354068811436065.

Sebastian, Edward. (2010). *Left Behind Latin America and the False Promise of Populism.* London: The University of Chicago Press. Hlm. 167

Suwitha, I Putu Gede. (2019). *Wacana "Kerajaan Majapahit Bali" Dinamika Puri Dalam Pusaran Politik Identitas Kontemporer.* Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 4, No. 1, 2019.

Sven Engesser, Nicole Ernst, Frank Esser & Florin Büchel (2017) Populism and social media: how politicians spread a fragmented ideology, *Information, Communication & Society*, 20:8, 1109-1126, DOI: 10.1080/1369118X.2016.1207697.

Thomas, Garry. (2012). *How To Do Your Case Study: Guide for Student and Researchers.* London: Sage Publication. Hal: 163.

Vedi R Hadiz dan Richard Robison, *"Competing populisms in post-authoritarian Indonesia"* dalam *International Political Science Review* 2017, Vol. 38(4) 488 –502.

Wardani, Ayu. (2016). *Representasi Politik Populis Jokowi dalam Video Youtube Flash Mob Versi "Jokowi-JK adalah Kita" Tahun 2014.* Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada Fadillawati.

